

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian penerapan tambak *silvofishery*, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya:
 - a) Aspek kesesuaian dengan Pedoman Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Tahun 2010, ketiga tambak (milik kelompok masyarakat di Kelurahan Sukabumi, tambak binaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, dan tambak milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo) sudah sesuai dengan pedoman.
 - b) Untuk aspek Kesesuaian dengan kawasan lindung hanya tambak binaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang saja yang melanggar garis sempadan pantai.
 - c) Sedangkan untuk aspek kesesuaian proporsi luasan tambak dan mangrove hanya tambak milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo saja yang sesuai dengan aturan, yaitu 60:40 untuk tambak dan mangrove.
2. Berdasarkan hasil analisis daya dukung fisik dan lingkungan diperoleh hasil:
 - a) Kemampuan dan kesesuaian lahan dengan variabel-variabel yang mengacu pada PerMen LH No. 17 Tahun 2009 diperoleh kesimpulan bahwa wilayah pesisir Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo di dominasi oleh Kelas III sehingga sangat sesuai untuk pengembangan wilayah pertanian dalam hal ini merujuk pada perikanan budidaya berupa tambak dan konservasi berupa hutan mangrove.
 - b) Berdasarkan hasil analisis aspek teknis menunjukkan bahwa tambak binaan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya adalah yang paling baik dari segi teknis karena selain tambak ini sudah memenuhi syarat sebagai sebuah tambak *silvofishery*. Sedangkan tambak Binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo ini memiliki kelemahan diantaranya adalah dari segi produksi yang rendah akibat penebaran benur yang tidak optimal. Padahal tinggi rendahnya produksi ini akan

mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh masyarakat bila mengembangkan sistem *silvofishery* ini.

- c) Berdasarkan analisis *ecological footprint*, diketahui bahwa kebutuhan ekologi paling besar untuk tiap hektar tambak terdapat pada tambak milik Kelompok Masyarakat namun memperoleh skor paling rendah senilai 1 karena semakin besar ruang ekologi yang diperlukan maka keberlanjutan dari tambak tersebut semakin rendah dan yang paling kecil adalah tambak Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo dan memperoleh skor tertinggi yaitu 3.
- d) Dari hasil perhitungan luas area bioproduktif, terlihat bahwa daya dukung sumber daya alam untuk ketiga tambak tersebut masih dibawah laju pertumbuhan sumber daya alam atau bisa dikatakan masih lestari (berkelanjutan). Nilai Ed terkecil terdapat pada tambak milik kelompok masyarakat di Kelurahan Sukabumi sehingga mendapat skor paling tinggi yaitu 3.
- e) Berdasarkan hasil proyeksi *ecological footprint* diperoleh hasil bahwa penerapan sistem *Silvofishery* menyebabkan luas kolam budidaya dalam kawasan tambak tersebut akan berkurang hingga mencapai 18,42 Ha. Namun, luasan hutan mangrove di Kecamatan Mayangan bertambah 27,63 Ha. Sehingga hutan mangrove yang awalnya hanya seluas 10,89 Ha bertambah menjadi 38,52 Ha. (dengan catatan seluruh tambak diubah menjadi tambak *silvofishery* dengan proporsi hutan mangrove dan kolam budidaya sebesar 2:3). Hal ini tentunya akan berdampak baik pada usaha tambak *silvofishery* milik warga karena hutan mangrove merupakan kawasan penyangga dari hempasan gelombang sekaligus sebagai tempat penghasil detritus mangrove yang digunakan sebagai pakan untuk ikan/udang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan bagi pemerintah, masyarakat, *stakeholder* dan akademisi dalam upaya pengelolaan kawasan pesisir dengan sistem *silvofishery* terkait dengan hasil studi, antara lain:

1. Saran bagi pemerintah dan masyarakat
 - a. Demi keberhasilan penerapan sistem silvofishery untuk mewujudkan pengelolaan pesisir secara berkelanjutan maka diperlukan kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan kelautan beserta penyuluh-penyuluh perikanan dan masyarakat lokal terkait komitmen yang kuat dalam menerapkan sistem silvofishery sesuai teknis dan aturan yang berlaku. Sehingga sistem ini tidak hanya sebagai wacana keberlanjutan ekologi yang ada tetapi dapat memberikan pengaruh nyata terhadap upaya pelestarian kawasan pesisir beserta ekosistem mangrovenya.
 - b. Pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan juga bisa diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat lokal dengan tindakan reforestasi yaitu menanami tambak konvensional dengan bibit mangrove pada hamparan lahan kosong di tengah tambak ataupun disepanjang tanggul. Dengan begitu akan menambah area bioproduktif sehingga suplay pakan untuk produksi tambak silvofishery juga akan terus terjaga.
 - c. Dibutuhkan juga kesadaran masyarakat bahwa tambak dengan sistem silvofishery tidak hanya bagi kepentingan ekologi saja tetapi juga bagi kelangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh sebab itu peran pemerintah dalam hal penyuluhan dan percontohan yang baik tentang tambak silvofishery sangat diperlukan.
2. Saran bagi penelitian lanjutan
 - a. Kelemahan dalam penelitian ini adalah daya dukung untuk kawasan tambak yang digunakan untuk *silvofishery* dianggap sama untuk seluruh tambak di Kecamatan Mayangan sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya ada kajian tersendiri untuk kesesuaian *silvofishery* dengan menggunakan pedoman daya dukung untuk wilayah pesisir.
 - b. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai aspek ekonomi untuk mengkaji penerapan sistem silvofishery dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
 - c. Diharapkan studi ini mampu didukung dengan kajian tentang aspek sosial ataupun respon masyarakat terhadap penerapan silvofishery pada wilayah pesisir di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.